

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Permenpan Nomo 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

### **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sstem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012, untuk melaksanakan amanah Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang ditetapkan tanggal 30 Januari 2012. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk nomor 10 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012.

Struktur organisasi BPBD adalah sebagai berikut :

Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Eks Officio

Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pelaksana BPBD yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana BPBD (Eselon II)
2. Sekretaris (Eselon IIIb) yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa)
  - Subkoordinator Subsubtansi Keuangan (Fungsional/setara Eselon Iva)
  - Subkoordinator Subsubtansi Penyusunan Program (Fungsional/setara Eselon IVa)
3. Kepala Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan (Eselon IIIb), yang membawahi:
  - Subkoordinator Subsubtansi Pencegahan/Mitigasi (Fungsional/setara Eselon IVa)
  - Subkoordinator Subsubtansi Kesiapsiagaan (Fungsional/setara Eselon IVa)
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Eselon IIIb) yang membawahi:
  - Subkoordinator Subsubtansi Kedaruratan (Fungsional/setara Eselon IVa)

- Subkoordinator Subsubtansi Logistik (Fungsional/setara Eselon IVa)
- 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Eselon IIIb) yang membawahi :
  - Subkoordinator Subsubtansi Rehabilitasi (Fungsional/setara Eselon IVa)
  - Subkoordinator Subsubtansi Rekonstruksi (Fungsional/setara Eselon IVa)

Struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk :



## 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan institusi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menangani urusan Penanggulangan Bencana. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi BPBD meliputi:

### TUGAS POKOK

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu:

*“Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan kewajiban dalam*

*penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.”*

## **FUNGSI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penanggulangan Bencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. KEPALA PELAKSANA**

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Penanggulangan Bencana.

### **1. Sekretariat.**

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Program, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan program.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan.
- Pelaksanaan kerumahtanggaan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **a. Subkoordinator Subsubtansi Penyusunan Program.**

Subkoordinator Subsubtansi Penyusunan Program mempunyai Tugas merumuskan penyusunan program kerja di bidang Penanggulangan bencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Subkoordinator Subsubtansi Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- Perumusan penyusunan rencana kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Penanggulangan Bencana.
- Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan pengembangan kerjasama lintas sektor.
- Pelaksanaan penyusunan sistem informasi manajemen dan pelaporan di Bidang

Penanggulangan Bencana.

- Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan di bidang penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Subkoordinator Subsubtansi Keuangan.**

Subkoordinator Subsubtansi Keuangan mempunyai tugas merumuskan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan evaluasi dan pelaporan keuangan. Subkoordinator Subsubtansi Keuangan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- Pelaksanaan pengadministrasian keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- Pelaksanaan penyusunan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana.
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas keuangan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan fungsinya.

#### **c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan pengelolaan tata naskah dinas.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi barang dan inventaris kantor dan kerumahtanggaan.
- Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang ketatausahaan, administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- Pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Resiko Bencana (PRB) dan Mitigasi.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **a. Subkoordinator Subsubtansi Pencegahan/Mitigasi**

Subkoordinator Subsubtansi Pencegahan/Mitigasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan kegiatan Pencegahan/Mitigasi. Seksi Pencegahan/Mitigasi mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pencegahan / Mitigasi
- Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis pencegahan bencana
- Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, identifikasi, fasilitasi
- Penyusunan pedoman standarsisasi teknis Analisis Resiko bencana dan Mitigasi bencana
- Penyusunan peta wilayah rawan bencana
- Pelaksanaan pemantuan, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Bencana
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi

### **b. Subkoordinator Subsubtansi Kesiapsiagaan**

Subkoordinator Subsubtansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kesiapsiagaan.

Subkoordinator Subsubtansi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan.
- Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesiapsiagaan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan.
- Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi.
- Penyusunan standar teknis peringatan dini dalam kegiatan Pencegahan Bencana.
- Pemantauan wilayah resiko terjadinya bencana, penerapan wilayah siaga bencana, dan penyiapan potensi sumberdaya.
- Pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kesiapsiagaan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai Tugas : merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kedaruratan dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik
- Pemberian komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana
- Pengendalian oprasional penanganan tanggap darurat
- Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban
- Pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana
- Pelaksanaan distribusi oprasional peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **a. Subkoordinator Subsubtansi Kedaruratan**

Subkoordinator Subsubtansi kedaruratan mempunyai tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerinytahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang kedaruratan. Subkoordinator Subsubtansi Kedaruratan mempunyai tugas:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kedaruratan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan
- Pengendalian operasi dan komando penanggulangan bencana pada saat penanggulangan bencana
- Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana
- Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **b. Subkoordinator Subsubtansi Logistik**

Subkoordinator Subsubtansi Logistik mempunyai tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang logistik. Subkoordinator Subsubtansi Logistik mempunyai Fungsi:

- Perumusan teknis di bidang logistik
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Logistik
- Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Logistik
- Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Pelaksanaan analisis kebutuhan Logistik dan Peralatan
- Pelaksanaan pemantuan distribusi kebutuhan logistik dan Peralatan
- Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan logistik dan peralatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi

#### **4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - Pemberiaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi.
  - Pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana, estimasi pembiayaan sarana dan prasarana
  - Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sarana fisik dan sosial ekonomi di wilayah pasca



bencana

- Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, kompensasi dan pengambilan hak pengungsi
- Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

**a. Subkoordinator Subsubtansi Rehabilitasi**

Subkoordinator Subsubtansi Rehabilitasi mempunyai tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi. Subkoordinator Subsubtansi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi
- Pemberian dukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rehabilitasi
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi
- Pelaksanaan kegiatan pengkajiaan, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kerusakan pasca bencana
- Pelaksanaan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat samapi tingkat yang memadai
- Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik dan sosial ekonomi di wilyah pasca bencana
- Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

**b. Subkoordinator Subsubtansi Rehabilitasi**

Subkoordinator Subsubtansi Rekontruksi mempunyai tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Rekontruksi. Subkoordinator Subsubtansi Rekontruksi mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Rekontruksi
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rekontruksi
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rekontruksi
- Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi di wilayah pasca bencana
- Pelaksanaan penempatan, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi
- Pelaksanaan pemulihan saran adan prasarana kelembagaaan di wilayah pasca bencana
- Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya

**D. ISU-ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*)**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Nganjuk dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja

kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 3 (tiga) tahun kedepan. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Nganjuk yaitu:

1. Penyusunan kajian-kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nganjuk untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;
4. Peningkatan kapasitas aparaturnya penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;
5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk – produk hukum perencanaan pembangunan;
7. Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kabupaten Nganjuk memiliki penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana alam dalam penanggulangan bencana juga menjadi isu utama pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu-isu yang berhubungan dengan :

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara menghadapinya;
- Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I      Pendahuluan**

Pada Bab ini minimal memuat :

- a. Gambaran umum/Latar belakang

- b. Landasan Hukum
- c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- d. Isu-isu Strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi
- e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan tentang :

- a. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja
- b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang Bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)
2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-tahun Sebelumnya
3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standart Nasional (Minamal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RINGKASAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun kedepan dalam tahun 2018-2023, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk mewujudkan Misi VI Bupati Nganjuk Tahun 2018 – 2023 yaitu “Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana”, maka ditetapkan Sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023 poin (d) yaitu “Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana” dan dibrakedown menjadi tujuan BPBD Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang berguna untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum dan memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap program yang telah ditetapkan.

##### **1. Sasaran**

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra BPBD Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program yang telah ditetapkan. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis yang disusun BPBD Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- b. Meningkatnya penanganan darurat bencana
- c. Meningkatnya pemulihan pasca bencana

##### **2. Arah Kebijakan**

Strategi yang dijelaskan sebelumnya merupakan upaya serius yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nganjuk dalam menunjang program pemerintah pusat maupun daerah. Strategi yang tertuang tersebut merupakan runtutan secara teknis dari arah kebijakan BPBD Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan program dan Kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Adapun arah kebijakan BPBD Kabupaten Nganjuk :

1. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi Bencana ditekankan pada :
  - a. Mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan baik intern OPD maupun dalam sistem

komando penanggulangan bencana

- b. Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan.
  - c. Mengalokasikan anggaran Pagu Indikatif OPD melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen dan penatausahaan keuangan.
  - d. Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan yang partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana
  - e. Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana
  - f. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
  - g. Peningkatan basis data sistem informasi kebencanaan dan memberikan layanan informasi rawan bencana
  - h. Peningkatan koordinasi dgn OPD terkait dalam pelestarian lingkungan di wilayah rawan bencana
  - i. Peningkatan upaya bersama masyarakat dalam upaya pemahaman, pencegahan dan kapasitas lainnya dalam penanggulangan bencana
2. Peningkatan kapasitas tanggap darurat penanggulangan bencana ditekankan pada:
- a. Meningkatkan pengelolaan barang inventaris dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen logistik
  - b. Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut.
  - c. Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dan Tim reaksi cepat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak sesuai ketentuan.
  - d. Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi pusdalop dan poskolop melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif.
  - e. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi.
  - f. Perlindungan korban bencana dalam masa siaga darurat dan tanggap darurat
3. Peningkatan kapasitas penanganan pasca bencana ditekankan pada :
- a. Meningkatkan sarana dan parasarana dasar hunian korban bencana yang layak dan sehat dengan mendorong swadaya masyarakat
  - b. Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan
  - c. Meningkatkan kondisi / kelancaran transportasi dalam penanggulangan bencana

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Utama BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk 2023

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Ketangguhan Penanggulangan Bencana yang meliputi: Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persentase desa tangguh bencana	100%
	Penanganan darurat	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	100%
	Penanganan Pasca Bencana	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	100%

## C. RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dilakukan penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. Rencana Kerja merupakan penjabaran atas Rencana Strategis (RENSTRA), sehingga seluruh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian RENSTRA.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk pada setiap tahunnya menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana dalam urusan tersebut, berupaya untuk mengakomodir dan merumuskan tujuan, sasaran yang kemudian diukur melalui indikator kinerja dan ditetapkan dalam sebuah target masing-masing pada tahun berjalan. Dengan terwujudnya tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pencapaian menunjukkan adanya komitmen yang besar dari Pemerintah Daerah terhadap program Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja yaitu proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerja kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

Skala Nilai	Kategori Nilai
> 100	Sangat Baik
80 > 100	Baik
> 55 - 80	Sedang
< 55 - 80	Kurang

#### A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan : Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana.

Sasaran:

1. Meningkatnya kesiapsiagaan, dalam menghadapi bencana
2. Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana
3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana

Berikut ini adalah tabel target, realis

asi dan capaian kinerja tahun 2023 :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi : Mitigasi Dan Kesiapsiagaan , Penanganan Darurat , Penanganan Pasca Bencana	Persentase desa tangguh bencana	100%	72%	72%
	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	100%	100%	100%
	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	100%	100%	100%
<b>Jumlah rata-rata capaian kinerja</b>				<b>90,66</b>

Untuk menganalisa apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target kinerja maka bisa mulai diukur dari sasaran dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi indikator yang ada.

a. Sasaran “Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana” dalam perjanjian kinerja diukur dengan indikator kinerja “Persentase desa tangguh bencana” yang dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana.

❖ Jumlah desa rawan di Kabupaten Nganjuk menurut KRB	100 desa
❖ Jumlah desa rawan yang ditargetkan menjadi Destana s/d 2023	0 desa
❖ Jumlah destana yang sudah dibentuk sampai 2022	71 desa
❖ Persentase target total destana yang dibentuk s/d 2023	100 %
❖ Jumlah destana yang dibentuk di tahun 2023	1 desa
❖ Jumlah destana yang sudah dibentuk s/d 2023	72 desa
❖ Persentase realisasi destana yang sudah dibentuk s/d 2023	64 %
❖ Persentase capaian kinerja	<b>71 %</b>

Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bisa dilihat juga dari Indeks Risiko Bencana yang setiap tahun dihitung oleh provinsi Jawa Timur. Untuk tahun 2023 secara Nasional masih dalam proses hitung Indeks Risiko Bencana. Berikut ini tabel indeks perkembangan IRB Kabupaten Nganjuk :

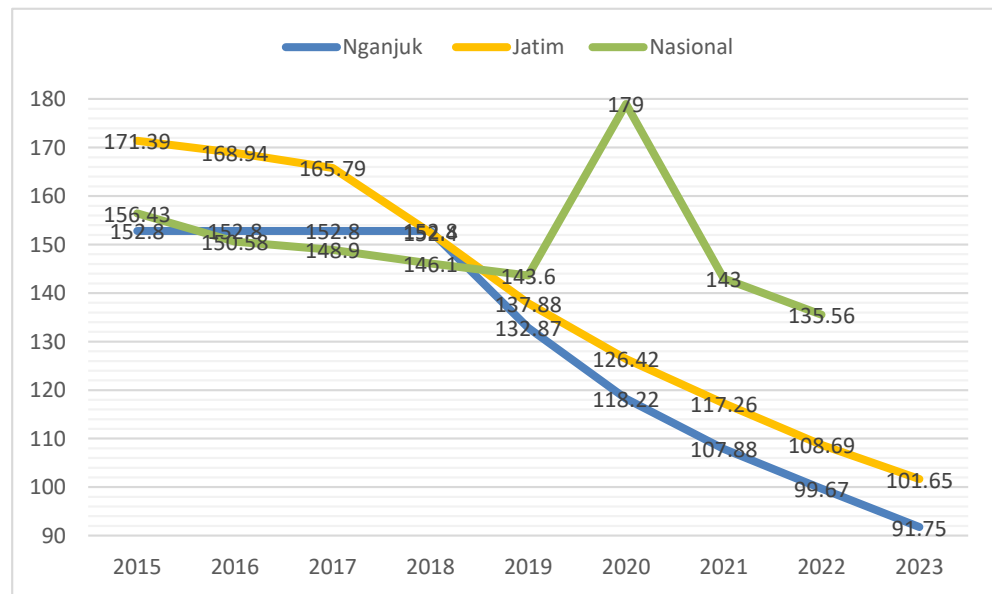
IRB	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Nganjuk	152,80	152,80	152,80	152,80	132,87	118,22	107,88	99,67	91,75



Provinsi Jawa Timur	171,39	168,94	165,79	152,40	138	126,42	117,26	108,69	101,65
Nasional	156,43	150,58	148,9	146,1	143,6	179,0	143,0	135,56	Proses Hitung

Sumber : InaRisk & BPBD Prov Jatim

IRB Kabupaten Nganjuk secara rata-rata masih lebih bagus karena lebih kecil dibanding IRB Provinsi Jawa Timur. Bila ditampilkan dalam grafik akan terlihat seperti dibawah ini :



Sumber: InaRisk dan IRB Provinsi Jawa Timur

Dari diagram diatas tampak bahwa IRB Kabupaten Nganjuk mempunyai tren menurun dan nilainya rata-rata lebih kecil dari IRB Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Semakin kecil nilai IRB, semakin kecil risiko yang terjadi akibat bencana. Ini artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah berbenah, lebih tanggap dan tangguh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Perhatian dari Pemerintah Daerah telah dilakukan terhadap beberapa hal yaitu tingkat ancaman bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas kemampuan untuk mencegah dan mengatasi bencana.

- b. Sasaran “Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana” diukur dengan indikator kinerja “Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat”. Waktu tanggap ditetapkan maksimal 24 jam yaitu waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Kegiatan tersebut meliputi pencarian, pertolongan, penyelamatan, evakuasi dan penyediaan logistik korban bencana. Kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran tersebut adalah : respon cepat penanganan darurat kekeringan ( dropping air bersih ) yaitu pengiriman terjadwal air bersih ke daerah terdampak kekeringan, kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada penanganan kejadian bencana yang dilaksanakan secara

terpadu dan terkoordinasi dalam menangani kejadian bencana banjir, longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim dan karhutla di Kabupaten Nganjuk selama tahun 2023, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu makan minum siap saji untuk korban terdampak bencana. Ketiga kegiatan tersebut mendukung agar kejadian bencana dapat segera direspon dengan cepat dan terlaksananya penanganan awal terhadap keadaan darurat bencana.

#### Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Jenis	Jumlah (kejadian)	Lokasi	Kerugian/ Dampak	Penyebab
1.	Banjir	14	Rejoso, Bagor, Pace, Berbek	Merusak akses jalan, sarana umum, pertanian, rumah warga, dan kerugian materi	Hujan dengan intensitas tinggi
2.	Tanah Longsor	9	Loceret dan Sawahan	Menutup akses jalan, sarana umum, irigasi, kerugian materi, dan merusak rumah warga	Hujan deras
3.	Puting beliung/ angin kencang (Cuaca Ekstrim)	14	Sukomoro, Nganjuk, Pace, Baron, Loceret, Berbek, Patianrowo, Kertosono, Ngluyu, Gondang, Sawahan, Rejoso	Mengganggu akses jalan, merusak rumah dan bangunan warga, merusak kabel/jaringan listrik, dan kerugian materi lainnya	Angin kencang
4.	Kekeringan	5	Lengkong, Ngetos, Jatikalen, Ngluyu	Mengganggu perekonomian masyarakat yang terdampak	Musim kemarau yang panjang
5.	Karhutla	3	Loceret, Wilangan, Sawahan	Mengganggu akses jalan, kesehatan masyarakat	Musim kemarau yang panjang
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>			

- Jumlah kejadian bencana yang ditangani BPBD tahun 2023 45 kejadian
- Jumlah kejadian yang direspon dalam waktu tanggap 45 kejadian
- Persentase target kejadian direspon dalam waktu tanggap 100%
- Persentase realisasi 100%
- Persentase capaian kinerja **100%**

Selain 45 kejadian bencana yang ditangani pada tahun 2023, BPBD Kabupaten Nganjuk juga ikut membantu ketika dibutuhkan bantuan untuk mencari korban yang disebabkan laka air (kecelakaan air) seperti orang tenggelam, terseret arus dan orang hilang di hutan.

c. Sasaran “Meningkatnya pemulihan pasca bencana” diukur dengan indikator kinerja “Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana” yang dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdapat 4 rumah roboh akibat bencana cuaca ekstrim dan semua sudah mendapat bantuan dari BPBD untuk direkonstruksi

- Jumlah kejadian yang ditangani/direhabilitasi pasca bencana 4 kejadian
- Target kejadian yang ditangani/direhabilitasi pasca bencana 4 kejadian
- Persentase target kejadian yang ditangani/direhabilitasi pasca bencana 100 %
- Persentase realisasi 100 %
- Persentase capaian kinerja 100 %

Dengan analisis diatas dapat dilihat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (2018-2023). Dari hasil analisis dan pengukuran capaian kinerja ketiga sasaran tersebut diatas, didapatkan jumlah rata-rata capaian kinerja adalah **91,75%**. Berdasarkan skala ordinal pencapaian sasaran tersebut termasuk dalam kategori "**tercapai**"

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk ikut mewujudkan sasaran dalam RPJMD yaitu “Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana” dengan menetapkan satu indikator yaitu “Cakupan penanganan penanggulangan bencana”. Capaian kinerja dari sasaran “Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana untuk tahun 2023” dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran RPJMD		Pengukuran Kinerja Tahun 2023			Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	65,47%	91,75%	71,35%	

Sasaran ini menggambarkan upaya penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Analisis capaian indikator “Cakupan penanganan penanggulangan bencana” sebagaimana uraian berikut:

- Jumlah penanganan penanggulangan bencana tahun 2023 45 kejadian
- Jumlah seluruh bencana yang terjadi tahun 2023 45 kejadian
- Realisasi “Cakupan penanganan penanggulangan bencana” 100%

- Target kinerja tahun 2023 100%
- Capaian kinerja tahun 2023 100%

Dari hasil analisis dan pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, didapatkan sasaran RPJMD "Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana" telah tercapai 100% karena target dan realisasi terukur 100%.

## A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023

Realisasi kinerja merupakan wujud dari capaian keberhasilan dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan kinerja yang ada pada urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan. Berikut kami tampilkan :

### a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja BPBD (%)			Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja BPBD (%)		
			2022					2023		
			Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	100%	71%	71%	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	100%	72%	72%
2	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	100%	100%	100%	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	100%	100%	105,26%	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	100%	100%	100%

### A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

Kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan target yang akan dicapai merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Oleh sebab itu perencanaan yang baik akan berdampak pada upaya untuk mencapai sebuah realisasi yang baik. Maka, pencapaian tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan atas implementasi program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Berikut kami gambarkan Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 dengan Target Jangka Menengah yang ada dalam RPJMD/RENSTRA :

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						CAPAIAN PADA TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase desa tangguh bencana	12	52	64	76	100	100	12	52	52	64	71	72	100	100	81.25	81.21	71	72
2	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	80	80	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	125	125	117	117.64	100	100
3	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	80.2	82	81.25	86	95	100	33.33	60	117	50	100	100	41.55	73.17	116	58.13	105.26	100

Berdasarkan data diatas, tingkat kemajuan pada masing-masing indikator cukup terlihat. Kondisi yang membaik tersebut merupakan kesuksesan dari pelaksanaan program badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota.

#### A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Kediri Tahun 2023

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Standard Nasional

No.	Kabupaten Nganjuk					Kabupaten Kediri				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	65,47	91,75	140,14	Meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi risiko bencana	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	126,11	104,53	82,88
	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat								
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana								

Berdasarkan tabel 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja diatas bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 dapat dihitung :  $91,75/65,47 \times 100\% = 140,14\%$ . Sedangkan, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri tahun 2023 dapat dihitung :  $104,53/126,11 \times 100\% = 82,88\%$ . Hal ini dapat diketahui bahwa dalam penanggulangan bencana Kabupaten Nganjuk termasuk berhasil.

## A. 5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Tercapai/Tidak Tercapai
	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	72	Tercapai
	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	100	Tercapai
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	100	Tercapai

Berdasarkan tabel 3.1.5 pada Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja pada masing masing sasaran strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain :

- a. Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan indikator kinerja persentase desa tangguh bencana target kinerja 100%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya pelatihan pembentukan desa tangguh bencana sampai dengan tahun 2023 sejumlah 72 desa. Maka, capaian kinerja dari persentase desa tangguh bencana yaitu 72% pada batas akhir tahun 2023 dan dinyatakan tercapai.
- b. Sasaran meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana dengan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat dengan target 100%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya penanganan bencana pada satu tahun periode terhitung dari data cakupan kejadian bencana yang ditangani oleh tim BPBD selama tahun 2023 terdapat sejumlah 42 kejadian bencana. Dengan rincian : Banjir 14 kejadian, Tanah Longsor 9 kejadian, Puting beliung/angin kencang (Cuaca Ekstrim) 14 kejadian dan kekeringan 5 kejadian. Selain itu tim reaksi cepat BPBD juga menangani laporan kejadian kecelakaan air dengan jumlah 8 kejadian, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 3 kejadian dan 29 kejadian lain. Maka, capaian kinerja dari Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat yaitu 100% pada batas akhir tahun 2023 dan dinyatakan tercapai.
- c. Sasaran meningkatnya pemulihan pasca bencana dengan indikator kinerja persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana dengan target 100%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulant



untuk rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana, sampai dengan akhir tahun 2023 sudah terlaksana sebanyak 4 infrastruktur dari target 4 sarana/prasarana infrastruktur yang ditetapkan, atau terealisasi 100 % yaitu pemberian bantuan stimulan rumah roboh milik Sdri. Tinah dan Sri Utami yang beralamat di Desa Juwono Kecamatan Kertosono, dan Sdr. Muari dan Rokimin yang beralamat di Desa Kunci Kecamatan Ngetos. Maka, capaian kinerja dari persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana yaitu 100% pada batas akhir tahun 2023 dan dinyatakan tercapai.

#### **A. 6 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Penggunaan sumber daya yang tepat memang menjadi fokus bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Nagnjuk, salah satu sumber daya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan adalah anggaran yang efisien dan efektif. Berikut kami jabarkan capaian kinerja dengan serapan anggaran BPBD Kabupaten Nganjuk :

<b>No</b>	<b>Sasaran Stragegis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Capaian Anggaran</b>	<b>% Tingkat Efisiensi</b>
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	72	96.26	14.68
2.	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	100	85.69	14.31
3.	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	100	70.35	34.91
<b>RATA – RATA</b>			<b>105.39</b>	<b>84.1</b>	<b>21.3</b>

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran pada masing-masing Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan memang difokuskan pada pencapaian sasaran dan kelompok sasaran urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

➤ Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan antara lain :

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Program ini adalah terwujudnya perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah serta administrasi perkantoran yang berbasis kinerja, guna meningkatkan pelayanan dasar dengan penyerapan dana sebesar 88.67%.

c. Program Penanggulangan Bencana

Hasil Program ini adalah terwujudnya Pemetaan Perkiraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nganjuk dengan penyerapan dana sebesar 90.82%

➤ Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target kinerja keuangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan

➤ Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan efisiensi, antara lain :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah ditetapkan untuk mendukung kegiatan pada pencapaian sasaran.

## A. 7 PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Visi dan Misi yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, ditentukan pada pencapaian program dan kegiatan. Berikut capaian urusan program dan Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program / Kegiatan (%)
1.			<b>Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>		
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	100
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	100
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	100
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi tamu yang disediakan	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk koordinasi dan konsultasi	64.88
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	100
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan kebutuhan telepon internet	100
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	100

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	100
<b>2.</b>			<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		
	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	100
			<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga harian lepas yang menangani kebencanaan	100
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan infrastruktur terdampak bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah gelar apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan	100
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah desa rawan bencana tempat dilakukan mitigasi struktural	100
	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam keadaan darurat	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tanggap darurat bencana kekeringan yang dilaksanakan	100

			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penanganan kejadian bencana dan penanganan korban yang berhasil dilakukan	100
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan dasar tanggap darurat bencana yang tersedia	100

**B. REALISASI ANGGARAN**

Tabel 3.2  
Realisasi Anggaran Athun 2023

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>6,209,483,774.00</b>	<b>5,463,592,533.00</b>	<b>745,891,241.00</b>	<b>87.99</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>6,209,483,774.00</b>	<b>5,463,592,533.00</b>	<b>745,891,241.00</b>	<b>87.99</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,222,581,274.00</b>	<b>3,605,346,151.00</b>	<b>617,235,123.00</b>	<b>85.38</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25,249,500.00</b>	<b>20,848,000.00</b>	<b>4,401,500.00</b>	<b>82.57</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,399,000.00	4,049,000.00	1,350,000.00	75.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,875,000.00	9,336,000.00	539,000.00	94.54
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,975,500.00	7,463,000.00	2,512,500.00	74.81
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,736,869,000.00</b>	<b>2,232,303,201.00</b>	<b>504,565,799.00</b>	<b>81.56</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,729,869,000.00	2,227,313,201.00	502,555,799.00	81.59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,500,000.00	2,839,000.00	661,000.00	81.11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,500,000.00	2,151,000.00	1,349,000.00	61.46
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>333,526,080.00</b>	<b>289,825,513.00</b>	<b>43,700,567.00</b>	<b>86.90</b>



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,054,110.00	3,992,750.00	61,360.00	98.49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,968,750.00	42,637,800.00	1,330,950.00	96.97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,891,120.00	10,022,925.00	868,195.00	92.03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,600,000.00	5,940,000.00	660,000.00	90.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,282,100.00	14,049,820.00	5,232,280.00	72.86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248,730,000.00	213,182,218.00	35,547,782.00	85.71
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>560,805,000.00</b>	<b>549,751,340.00</b>	<b>11,053,660.00</b>	<b>98.03</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	560,805,000.00	549,751,340.00	11,053,660.00	98.03
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>110,550,000.00</b>	<b>87,933,607.00</b>	<b>22,616,393.00</b>	<b>79.54</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,550,000.00	2,523,960.00	26,040.00	98.98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108,000,000.00	85,409,647.00	22,590,353.00	79.08
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>455,581,694.00</b>	<b>424,684,490.00</b>	<b>30,897,204.00</b>	<b>93.22</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380,184,450.00	377,135,054.00	3,049,396.00	99.20
Pemeliharaan Mebel	4,952,500.00	4,852,500.00	100,000.00	97.98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58,219,794.00	31,688,901.00	26,530,893.00	54.43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,224,950.00	11,008,035.00	1,216,915.00	90.05
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1,986,902,500.00</b>	<b>1,858,246,382.00</b>	<b>128,656,118.00</b>	<b>93.52</b>
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>37,797,850.00</b>	<b>36,230,150.00</b>	<b>1,567,700.00</b>	<b>95.85</b>

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	37,797,850.00	36,230,150.00	1,567,700.00	95.85
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1,577,486,150.00</b>	<b>1,503,959,772.00</b>	<b>73,526,378.00</b>	<b>95.34</b>
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	83,600,800.00	80,511,825.00	3,088,975.00	96.31
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0.00	-	-	-
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	41,617,500.00	38,063,380.00	3,554,120.00	91.46
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1,334,550,000.00	1,269,769,767.00	64,780,233.00	95.15
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	117,717,850.00	115,614,800.00	2,103,050.00	98.21
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>371,618,500.00</b>	<b>318,056,460.00</b>	<b>53,562,040.00</b>	<b>85.59</b>
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	195,990,000.00	154,074,200.00	41,915,800.00	78.61
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40,557,000.00	36,193,900.00	4,363,100.00	89.24
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	135,071,500.00	127,788,360.00	7,283,140.00	94.61
<b>Jumlah</b>	<b>6,209,483,774.00</b>	<b>5,463,592,533.00</b>	<b>745,891,241.00</b>	<b>87.99</b>

Melalui program yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, sasaran kinerja BPBD diharapkan dapat terwujud. Program yang efisien dan efektif diharapkan akan mewujudkan implementasi program yang maksimal dan menghasilkan output serta outcome yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ada salah satu sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana yaitu Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota dikarenakan pada Triwulan IV ada Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK). Dari kurangnya penambahan dana maka anggaran dari sub kegiatan tersebut dialihkan pada sub kegiatan yang sifatnya darurat.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Nganjuk ini merupakan laporan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2023, dengan kata lain laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dana atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2023 BPBD Kabupaten Nganjuk, yang dilakukan secara mandiri (self assesment) adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, capaian  
72%
- Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana, capaian  
100%
- Sasaran strategis 3 : Meningkatkan pemulihan pasca bencana, capaian 100%

Dengan rata-rata capaian adalah 105,39% artinya dengan kategori **SANGAT BAIK**. Capaian yang diperoleh tersebut tidak lepas dari dukungan seluruh pegawai BPBD Kabupaten Nganjuk, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan dinas lain lintas sektor. Untuk meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana;
2. Mendapatkan dukungan anggaran sesuai Standar Pelayanan Minimal agar semua sasaran strategis bisa dilaksanakan sesuai perencanaan yang sudah dibuat
3. Merencanakan penambahan sarana dan prasarana, peralatan dalam upaya penanggulangan bencana;
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh stake holder bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

5. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan para relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana;

Demikian Laporan Kinerja Instansi BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini disajikan. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BPBD Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Nganjuk 16 Januari 2024

Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**SUHARONO, S.Sos, MM**

Replika Utama Muda

NIP. 19690905 199003 1 005